

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN
TOKO MODERN DI KOTA YOGYAKARTA
(Studi Kasus Kehadiran Supermarket Superindo Minimarket Alfamaret
Dan Indomaret Di Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

FERONIKA OKTOVINA.WOGAN

08521938



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
"APMD" YOGYAKARTA
2016**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN TOKO
MODERN DI KOTA YOGYAKARTA
(Studi Kasus Kehadiran Supermarket Superindo Minimarket Alfamaret
Dan Indomaret Di Kota Yogyakarta)**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjan Ilmu
Politik(SIP), Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta**



Disusun Oleh:

FERONIKA OKTOVINA.WOGAN

08521938



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana bukan merupakan hasil karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016



Feronika Oktovina.Wogan
08521938

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Oktober 2016
Jam : 12:00 Wib Samapi dengan Selesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

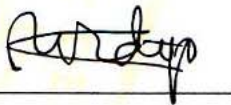
NAMA

TANDA TANGAN

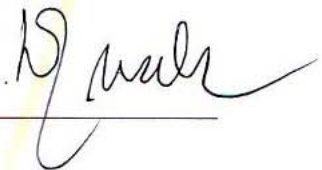
Dra. Tri Daya Rini, M.si
Ketua /Penguji/Pembimbing



Drs.YB.Widyo Hari Murdianto, M.si
Penguji Samping I




Dra. Herawati, MPA
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Gregorius Sahdan ,S.IP,M.A

MOTTO

Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan,
tetapi dengan menjadi cerdas kita bisa menggapai kesuksesan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-NYA , sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, adapun skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Almamaterku Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- ❖ Kedua Orang Tua Saya Bapak Petrus.Wogan dan Ibu Alfonsina.Komber yang tersayang, terima kasih atas doa, dorongan ,maupun dukungan baik secara moriil maupun materi sehingga saya dapat kuliah dan menyelesaikan kuliah dengan baik.
- ❖ Suami serta Ke-4 anak yang tercinta yang selalu ada setiap waktu dan jadi penyemangat saya
- ❖ Ke- 6 Saudara kandung saya dan ke-4 ipar saya beserta anak-anak yang tersayang
- ❖ Keluarga Besar Wogan, Apay, Komber, Taswa dan Hegemur
- ❖ Keluarga merauke fak-fak yang ada di timika
- ❖ Teman seangkat 2008 selama di Yogyakarta
- ❖ Keluarga Besar IPMAMI Yogyakarta
- ❖ Kakak Daud,Noflin,Jamal,Harjat,Egenia,Sina & anak Ganesha dan made Tina
- ❖ Adik fany,veny,jeny,emy,rison,nurita,edison,dan jube

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN TOKO MODERN DI KOTA YOGYAKARTA” dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk dan bimbingan yang telah penulis terima selama melakukan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian untuk penulis;
3. Ibu Dra.Tri Daya Rini,M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis,yang telah banyak memberi bimbingan dan masukan dalam penulisan ini.

4. Bapak Drs.YB.Widyo Hari Murdianto, M.si dan Ibu Dra. Herawati, MPA selaku dosen penguji dan sekaligus yang memberikan saran dan kritik untuk perbaikan skripsi penulis;
5. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
6. Para pihak yang telah membantu memberikan data-data terkait dengan penelitian penulis;
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya;
8. Teman-teman di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, terimakasih banyak atas kebersamaan dan semangatnya selama ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran membangun masih penyusun butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016

Penulis

Feronika Oktovina.Wogan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
SINOPSIS.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Kebijakan Pemerintah	8
2. Perizinan Toko modern.....	16
F. Ruang Lingkup Penelitian	25
G. Metode Penelitian.....	26

1. Jenis Penelitian.....	26
2. Teknik Pengumpulan Data	26
3. Unit Analisis	28
4. Teknik Analisis Data.....	28
BAB II DESKRIPSI KOTA YOGYAKARTA, KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA DAN TOKO MODERN DI KOTA YOGYAKARTA	31
A. Profil Kota Yogyakarta	31
B. Profil Kantor Dinas pelayanan perizinan Kota Yogyakarta.....	37
C. Profil Toko Modern di Kota Yogyakarta	49
BAB III ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN TOKO MODERN DI KOTA YOGYAKARTA.....	54
A. Deskripsi Informan.....	54
B. Analisis Data Informan.....	57
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prosentase Pedagang Pasar Tradisional dan Warung Tradisional yang mengalami Penurunan Omset	5
Tabel. 2.1 Luas Wilayah Kecamatan	32
Tabel 2.2. Jumlah Pasar Modern di Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2012	50
Tabel 2.3. Jumlah Waralaba Minimarket Tiap Kecamatan.....	51
Tabel 2.4. Ruas Jalan untuk Pendirian Waralaba Minimarket	52
Tabel 3.1 Data Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	54
Tabel 3.2 Data Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	55
Tabel 3.3 Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan/Jabatan	56
Tabel 3.4 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Perizinan (Perda No 10 Th 2008).....	42
Bagan 2. Prosedur Pelayanan Izin di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	46

SINOPSIS

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan izin toko modern sangat diperlukan, hal ini dikarenakan toko modern telah mampu menghadirkan inovasi baik dari segi pelayanan terhadap konsumen maupun sarana dan prasarana modern yang terdapat di masing-masing toko modern, dibandingkan dengan pasar tradisional yang merupakan tempat berbelanja dengan segala resiko munculnya berbagai toko modern yang telah menjamur diseluruh wilayah kota yogyakarta memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Pemerintah kota yogyakarta tentu saja tidak tinggal diam melihat gejala yang terjadi di masyarakat tersebut. Berbagai kebijakan telah diadopsi dalam proses formulasi. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin toko modern di Kota Yogyakarta?

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Obyek dalam penelitian ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin toko modern di Kota Yogyakarta. Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja pelayanan perizinan Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Seksi Bidang Pengawasan dan Pengaduan IUTM Kota Yogyakarta, Kepala Seksi Usaha Dagang (Disperdagkoptan) Kota Yogyakarta, Manajer Indomaret (pelaku toko modern, dan Masyarakat yang berjumlah 6 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Toko Modern di Kota Yogyakarta dalam pendirian toko modern tidak semua toko modern memenuhi ketentuan, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (1) memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional menurut dinas perizinan kota yogyakarta sudah mengacu pada tata ruang dan kondisi wilayah setempat. Akan tetapi berbeda dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa pendirian toko modern tersebut diketahui oleh mereka sebagai pedagang kecil disekitar toko modern. (2) memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, masih ada toko yang didirikan dekat dengan pasar tradisional. (3) persyaratan perizinan toko modern sudah gampang dalam mengurus izin pelaku/pemohon langsung datang dan mengurus izin di kantor dinas perizinan kota yogyakarta, tetapi masih terjadi pelanggaran karena pelaku/pemohon yang tidak mengurus izin pendirian toko modern (4) pengawasan pelaksanaan kemitraan antara pasar tradisional dan toko modern sudah di lakukan oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi dan pertanian kota yogyakarta akan tetapi kurang terbuka kepada masyarakat tentang kapan dan apa yang di lakukan pada saat pelaksanaan kemitraan itu di lakukan.

Kata Kunci: kebijakan, izin toko modern

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan izin pasar modern sangat diperlukan, hal ini dikarenakan Toko modern telah mampu menghadirkan inovasi baik dari segi pelayanan terhadap konsumen maupun sarana dan prasarana modern yang terdapat di masing-masing Toko modern. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Toko modern merupakan Toko dengan sistem pelayanan mandiri dan menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Sistem pelayanan mandiri Toko modern membuat konsumen lebih leluasa melihat komoditas dan harga komoditas pada masing-masing Toko modern. Selain itu, konsumen Toko modern dapat menjangkau barang yang akan dibelinya pada etalase yang terdapat di Toko modern untuk kemudian melakukan pembayaran pada kasir yang tersedia di masing-masing Toko modern. Selain sistem pelayanan mandiri, Toko modern juga didukung dengan sarana dan prasarana diantaranya bangunan megah dan mewah, ruang belanja ber-AC, radio informasi, lahan parkir yang luas, kafetaria, perbankan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), hingga tersedianya mang bermain anak.

Ekspansi toko modern yang semakin giat dilakukan di Kota Yogyakarta direfleksikan oleh kehadiran toko modern dalam berbagai bentuk baik minimarket, supermarket, departmen store, hypermarket, dan mall. Hasil pengamatan terhadap ekspansi toko modern di Kota Yogyakarta menunjukkan terdapat 3 kelompok toko modern di Kota Yogyakarta. Pertama, toko modern berskala lokal yaitu toko modern yang hanya ada dilingkungan Kota Yogyakarta diantaranya Mega Swalayan, Mirota Kampus Swalayan.

Kedua, toko modern berskala nasional yaitu Toko modern yang tidak hanya ada di Kota Yogyakarta namun tersebar di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya Minimarket Alfamart, Minimarket Indomaret. Ketiga, toko modern namun di mancanegara diantaranya yaitu Minimarket Circle-K, Carrefour dan Superindo. Data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah toko modern secara terus menerus dari tahun 2007 hingga tahun 2013 sebanyak 75 outlet. Hasil pengamatan menunjukkan jumlah toko modern di Kota Yogyakarta terus bertambah. (Data Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan pertanian Yogyakarta)

Fokus penelitian yang diambil adalah kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian izin toko modern. Untuk mengantisipasi munculnya kanibalisme pelaku usaha modern seperti supermarket terhadap pelaku usaha lemah dalam hal ini pasar atau pedagang tradisional, diperlukan pembinaan dan penataan sehingga para pelaku usaha perdagangan ini bisa sama-sama tumbuh. Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2011

tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko Modern Penyelenggaraan dan pendirian toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
2. Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional.
3. Menyediakan fasilitas yang menjamin bersih sehat, *hygenis*, aman, tertib dan publik yang nyaman.
4. Menyediakan kualitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan.
5. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai di dalam area bangunan.
6. Menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern. (Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tersebut dimaksudkan agar persaingan antara pasar modern dengan pasar tradisional di Kota Yogyakarta semakin terkendali. Dengan munculnya berbagai macam Toko modern seperti Indomaret dan Alfamaret yang telah

menjamur di seluruh wilayah Kota Yogyakarta memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang diberikan antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan karena minimarket memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu letaknya yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan membuat minimarket mudah dijangkau. Hal lain yang berkaitan dengan dampak positif yang diberikan minimarket adalah fasilitas yang nyaman dan bersih, harga-harga yang terjangkau dan seringnya diskon maupun potongan-potongan harga terhadap produk-produk tertentu.

Dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, minimarket dapat menambah peluang kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengangguran. Selain dampak-dampak positif yang telah disebutkan di atas, maraknya Toko modern juga memberikan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif yang utama dengan munculnya toko modern adalah mematikan pasar tradisional. Persaingan keberadaan pasar tradisional maupun toko kebutuhan sehari-hari (toko kelontong) tradisional muncul karena fasilitas, kenyamanan maupun pelayanan dari minimarket yang lebih baik sehingga membuat konsumen lebih memilih ritel modern tersebut. Hal ini jelas dapat mematikan keberadaan pasar dan warung tradisional yang jumlahnya lebih besar dan menyangkut hajat hidup masyarakat yang lebih luas.

Ekspansi toko modern di Kota Yogyakarta menjadi tantangan bagi pasar tradisional, hal ini dikarenakan ekspansi pasar modern berdampak

terhadap omset pasar tradisional Kota Yogyakarta. Data hasil riset Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta (2012:20). menunjukkan setiap minggunya pasar tradisional Kota Yogyakarta mengalami penurunan omset penjualan sebesar 5,59%. Data tersebut berdasarkan hasil perbandingan omset penjualan antara 3 sampai dengan 4 tahun sebelum dan sesudah tahun 2007 dengan catatan pada tahun 2007 merupakan awal ekspansi pasar modern di Kota Yogyakarta. Penurunan omset penjualan pasar tradisional dialami oleh seluruh lapisan pedagang dengan tingkatan jumlah omset yang dimiliki pedagang pasar tradisional yaitu:

Tabel 1.1 Prosentase Pedagang Pasar Tradisional dan Warung Tradisional yang mengalami Penurunan Omset

Jumlah Omset Pedagang Pasar dan warung tradisional	Penurunan Omset Pedagang Pasar (%)	Penurunan Omset Warung Tradisional (%)
<Rp. 1.000.000,00	18%	20%
Rp. 1.000.000,00 - Rp. 2.000.000,0	16%	17%
Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000,00	23%	30%
Rp. 10.000.000,00-Rp. 20.000.000,00	6%	15%
>Rp. 20.000.000,00 4%	4%	9%

Sumber: Studi Formulasi Kebijakan Perlindungan dan Model Pengembangan Pasar Tradisional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Pusat Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada.

Dewasa ini ekspansi toko modern semakin menimbulkan kekhawatiran bagi pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Pengalaman menghadapi penurunan omset dari tahun ke tahun pasca ekspansi toko modern sejak tahun 2007 ditambah munculnya kecenderungan masyarakat untuk berbelanja di toko modern. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa toko modern tidak hanya sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi toko modern menjadi tempat rekreasi dan prestise bagi masyarakat untuk memperoleh pengakuan maupun- penerimaan dari masyarakat di lingkungan sosialnya. Adanya stigma yang mengakar di masyarakat di mana pasar tradisional merupakan tempat berbelanja dengan segala resiko baik dari segi keamanan maupun kenyamanan juga turut mengkhawatirkan pasar tradisional dalam menghadapi ekspansi Toko modern yang notabene memberikan pelayanan yang lebih mengedepankan aspek kenyamanan dan keamanan bagi konsumen.

Pemerintah Kota Yogyakarta tentu saja tidak tinggal diam melihat gejala yang terjadi di masyarakat tersebut. Berbagai kebijakan telah diadopsi dan dalam proses formulasi berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional dan toko modern. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Walikota No.79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba. Peraturan walikota ini bertujuan untuk melindungi keberadaan warung maupun pasar tradisional yang telah ada sejak dulu yang merupakan salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak melarang pendirian Toko modern di wilayah Kota Yogyakarta, tetapi lebih berupaya untuk membatasi

keberadaannya. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menetapkan batas kuota maksimal minimarket di Kota Yogyakarta adalah 52 unit.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah saat ini pemerintah Kota Yogyakarta terkesan kurang tegas terhadap keberadaan toko modern. Terbukti di beberapa tempat telah berdiri ritel modern yang ternyata tidak mengantongi ijin, sehingga sangat dimungkinkan data dari Dinas Perijinan 14 ritel modern di Kota Yogyakarta menjadi tidak valid, karena tidak berijin alias ilegal. Dengan kata lain, regulasi dan kebijakan yang telah diadopsi ternyata tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Artinya, seberapa bagus kebijakan tetapi tanpa implementasi yang baik maka hasilnya adalah nihil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan pasar yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta implementasinya. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Toko Modern Di Kota Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin Toko modern di Kota Yogyakarta?"

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, Iskandar. 2001. *Proses Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metode Research*. Jilid I. Yogyakarta: ANDI.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nasution, Nugroho .2003. *Analisis Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo
- (<https://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah/>).

Peraturan Perundang-undangan:

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembaharuan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

UU Nomor 2 pasal 23 angka 1 Tahun 2013 Tentang perizinan pasar